Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra Otonom Atas Tubuhnya, Sehat dan Kreatif

Newsletter IV
Juli - Desember 2016



h.7
FKPAR



h.15
FMS



h.24
Cerita
Perubahan

BERJUANG BERSAMA MELAWAN PEMISKINAN PEREMPUAN



Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra Otonom Atas Tubuhnya, Sehat dan Kreatif

Pemimpin Redaksi	Dina Lumbantobing	**Kontributor**	Direktur Eksekutif,
Sekretaris Redaksi	Sustriana Saragih		Koord.Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota
	Tety Sumeri	**Layout**	Mohamad Reza
Editor Foto	Mohamad Reza	**Distribusi**	Sustriana Saragih

Sekretariat PERMAMPU
Jl.Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 I e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org I Facebook: PermampuConsortium

Selamat bertemu kembali di edisi keempat Newsletter Permampu. Dalam periode 6 bulan ini (Juli – Desember 2016), PERMAMPU telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada kekuatan kolektif perempuan akar rumput, kemampuan perempuan dampingan mengakses layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, dan advokasi untuk kebijakan yang peka terhadap pemenuhan HKSR perempuan.

Perjalanan Permampu sepanjang 2016 menunjukkan berbagai keberhasilan bertingkat dan mengakar melalui pengorganisasian perempuan akar rumput yang dibarengi kekuatan ekonomi, serta akses terhadap pengetahuan dan informasi; khususnya kesadaran kritis mengenai HKSR.

Berbagai manfaat mulai dinikmati perempuan akar rumput melalui perbaikan layanan di lembaga layanan kesehatan baik di pedesaan maupun di wilayah miskin ataupun terisolir. Keberhasilan ini didasari oleh komunikasi perempuan akar rumput dengan para pihak yang semakin menguat dan yang menjadi basis penting untuk keluarnya kebijakan-kebijakan pemenuhan HKSR Perempuan ditahun 2017.

Keberlanjutan Permampu sebagai Konsorsium yang dapat terus berjuang untuk Advokasi HKSR di pulau Sumatera juga telah mulai dirancang.

Dengan capaian 2016, Permampu percaya Advokasi HKSR dapat semakin menguat dan berhasil di tahun 2017 dan seterusnya.

Selamat Tahun Baru.

Dina Lumbantobing
(Koord. Konsorsium Permampu)

Daftar Isi

1 Editorial
2 Salam Redaksi
3 Akuntabilitas
7 FKPAR
15 FMS
24 Cerita Perubahan
27 Liputan Media PERMAMPU

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan

Konsorsium PERMAMPU

Australian Aid

Capaian PERMAMPU Juli - September 2016 & Laporan Realisasi Anggaran PERMAMPU 2016

Oleh : Dina Lumbantobing
Koordinator Konsorsium Permampu

Kelompok ekonomi (simpan – pinjam) perempuan pedesaan dan miskin kota telah semakin mandiri dan diharapkan akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Hingga akhir Desember 2016 sudah terbentuk 437 kelompok dengan 17.857 perempuan dewasa sebagai anggota, serta anak laki-laki dan perempuan sebanyak 1.572 orang; dengan total saham sebesar Rp. 31.279.163.603.

Seluruh kelompok ini bernaung dibawah 8 Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) dari 8 propinsi yang baru-baru ini mengadakan Perayaan & Konsolidasi se-Sumatera, yang dilakukan di Pekanbaru, Riau pada tanggal 18-20 Oktober 2016 dengan tema "Berakar Kuat, Berjuang Bersama Melawan Pemiskinan Perempuan". FKPAR adalah salah satu pilar utama untuk penguatan ekonomi dan advokasi Permampu.

Kekuatan kolektif perempuan dampingan Permampu di 8 Propinsi semakin terbangun dan menyadarkan publik akan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya masalah HKSR. Hal ini dilaksanakan pada hari-hari penting gerakan perempuan, mulai dari tingkat lokal sampai internasional, terutama pada:

a. **Hari Perempuan Sedunia (8 Maret)** dimana tahun ini yang mengangkat tema "Bersama Gerakan Perempuan Indonesia Bersatu melawan Ketimpangan". Ketimpangan merupakan isu ke 10 di SDGs, yang secara khusus dipahami sebagai ketimpangan posisi perempuan dan laki-laki yang menjadi salah satu akar pemiskinan dan berbagai bentuk diskriminasi.
b. **Hari Perempuan Pedesaan dan Penghapusan Kemiskinan di bulan Oktober**. Tahun ini tema yang diusung " Berakar Kuat, Berjuang Bersama Melawan Pemiskinan Perempuan". Tema ini dimaksudkan untuk menyadarkan semua pihak bahwa kemiskinan yang dialami oleh perempuan karena posisinya berbeda dengan laki-laki,
c. **Perayaan 16 Hari Aktivisme (25 November - 10 Desember)** dengan tema besar "Lindungi Perempuan Muda dari Kekerasan Seksual, Pernikahan Anak dan Pernikahan Dini – Penuhi Hak Perempuan untuk Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi".
d. **Perayaan Hari Ibu /Hari Pergerakan Perempuan Indonesia tingkat Sumatera (22 Desember)** dengan berfokus pada Pentingnya peranan Forum Multi Stakeholder (Tokoh adat, tokoh agama, SKPD terkait, FKPAR, Pembatra serta Pemerintah Desa) untuk Advokasi Kebijakan pemenuhan HKSR. Perayaan ini dihadiri oleh 43 orang (30 perempuan & 13 laki-laki) FMS, dan 22 orang dari lembaga pendamping anggota Permampu.

Seluruh kelompok perempuan dampingan yang bernaung di bawah FKPAR telah melakukan upaya-upaya advokasi, baik secara gerakan perempuan di tingkat akar rumput di tingkat Kabupaten, Propinsi sampai ke tingkat pulau Sumatera; juga bergerak bersama para pihak yang berkepentingan melalui Forum Multi Stakeholder.

Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam layanan kesehatan-HKSR yang mudah, cepat, tepat dan bermutu. Pengorganisasian telah membuka akses perempuan pedesaan, miskin kota dalam mengkases berbagai layanan yang menyangkut kesehatan tubuh dan reproduksi, seperti test IVA, pap smear dan sebagian untuk mammografi. Di propinsi Lampung telah ada instrument untuk database mengenai pelayanan dasar yang saat ini diuji coba di 30 Puskesmas di Lampung.

Institusi keluarga, adat dan agama telah mulai berubah cara pandang mengenai aturan adat dan agama terkait Kesehatan-HKSR. Para tokoh adat dan agama serta kelompok perempuan dan Pemerintah



Seluruh peserta foto bersama usai acara Lokakarya FMS se-Sumatera di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 22 – 23 Desember 2016

Dok. PERMAMPU

local bergabung dalam Forum Multi Stakeholder/FMS, yang juga menjadi pilar utama untuk Advokasi HKSR. Keberhasilan FMS adalah antara lain melaksanakan konseling pranikah, telah ada draft buku saku pranikah, mencetak Buku Adat Sumber Cahyo di Kota Bengkulu yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adanya draft buku panduan dalil-dalil agama Islam tentang HKSR juga telah disusun di Kabupaten Rejang Lebong serta Kesepakatan Tokoh Adat dan Tokoh Agama tentang Usia Minimal Nikah (20 tahun) di Nias Barat dan Nias. Pemerintah desa dan Kabupaten/kota telah mulai membuat kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Kesehatan dan HKSR.

Alokasi anggaran P2TP2A meningkat di Kabupaten Merangin, Jambi dan Kabupaten Pidie, Aceh. Anggaran untuk lokalatih HKSR untuk tenaga medis, dan untuk tokoh agama tersedia di Kabupaten Rejang Lebong. Serta alokasi anggaran untuk papsmear, mamografi dan sosialisasi HKSR di RAPBK 2017 Kota Banda Aceh.

Dana yang dikelola untuk program HKSR PERMAMPU sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp 10.121.511.775,- dengan rincian: dana program dan institutional cost sebesar Rp 9.369.572.652,- dana corefund sebesar Rp 751.939.123,-.

KILASAN PROGRAM PERMAMPU 2016

Seminar Agama dan Adat di Sumatera Utara

Pesada mengadakan seminar agama Islam dengan tema *"Peran Agama dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi Perempuan"* di Kab. Langkat.

Tujuan seminar ini adalah menumbuhkan kesadaran atas adanya bentuk-bentuk praktek kehidupan beragama dalam agama Islam yang kurang mendukung pemenuhan HKSR perempuan.

Dari dialog-dialog dalam seminar ini, peserta memahami isu mengenai agama Islam dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pesada bersama Permampu. Peserta juga mengetahui praktek-praktek adat dan agama yang kurang sesuai dengan kebijakan nasional/internasional tentang pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan yang dihasilkan melalui Penelitian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Selain itu Pesada juga mengadakan seminar adat dengan tema ***"Membangun dukungan Tokoh Adat Nias & Adat Batak Toba untuk perlindungan perempuan dan anak dalam rangka pemenuhan HKSR"*** di Kab. Nias dan Humbang Hasundutan. Diskusi ini sangat menarik dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik.

Tokoh Adat menggunakan kutipan-kutipan dari ayat Alkitab untuk melakukan pelanggaran HKSR. Alkitab menyatakan "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi…." Menurut pandangan tokoh adat, ketika kita membiarkan perempuan tidak menikah atau tidak memiliki anak, berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan.

Diskusi-diskusi kritis dalam seminar diharapkan akan bisa membangun kesadaran para tokoh untuk bisa merubah praktek-praktek adat yang merugikan perempuan.

Workshop sehari "Memperkuat Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban

Kekerasan Atas Kebenaran, Keadilan, dan Pemulihan – DAMAR Lampung

Kegiatan ini dilatarbelakangi atas kondisi bahwa perempuan korban kekerasan masih sulit mengakses keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum pidana (substansi, struktur, maupun budaya hukum) Indonesia yang belum memiliki perspektif yang melindungi dan memberi keadilan bagi korban.

Kehadiran lembaga pengada layanan di Lampung, khususnya di Lampung Utara sangat dibutuhkan untuk mendekatkan korban pada haknya. Sejalan dengan semangat pemenuhan hak korban terutama perempuan korban kekerasan (seksual) harus disikapi dengan mengembangkan berbagai konsep dan mekanisme pemenuhan hak korban.

Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah mengembangkan Pemulihan Dalam Makna Luas (PDML) dimana peneguhan peran seluruh pihak baik masyarakat maupun Negara yang integratif menjadi salah satu prasyarat mutlak untuk memenuhi hak korban secara utuh. Konsep ini menegaskan kembali arti penting upaya legal-formal sebagai wujud dari tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk meneguhkan peran seluruh pihak baik masyarakat maupun Negara yang terintegratif untuk memenuhi hak korban secara utuh, maka Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR bersama Kesatuan Perempuan Lampung menyelenggarakan Workshop dengan tema *"Memperkuat Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Atas Kebenaran, Keadilan, dan Pemulihan"* untuk membangun kesepakatan dalam menyusun langkah strategis penjaminan pemenuhan hak perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

> *"Pemenuhan hak korban kekerasan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah saja namun juga masyarakat sebagai wujud kepedulian atas pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Kehadiran Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR sangat dibutuhkan guna membantu perempuan dalam menuntut dan memperjuangkan haknya. Oleh karena itu atas nama Koordinator Pelayanan Masyarakat Lampung Utara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Advokasi Perempuan Damar yang telah memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak. Selain DAMAR, juga ada Kesatuan Perempuan Lampung Utara yang merupakan salah satu organisasi yang ada di kabupaten lampung utara yang selalu berjuang dan mendorong pemenuhan hak baik perempuan dan anak-anak korban kekerasan."*
>
> ***(Hi. Zulkifli Mihsan, SH, MM, Asisten 3 Kabupaten Lampung Utara)***



Dok. PERMAMPU

Foto bersama di sela-sela Kunjungan Permampu ke Rukun Senior Living untuk inspirasi Keberlanjutan Permampu

Rumah Sehat Flower Aceh

Rumah Sehat Flower Aceh mulai memfokuskan pada promosi, peningkatan kualitas layanan, pembenahan manajemen, dan pengurusan izin praktik dan produk herbal yang diproduksi. Promosi dilakukan dengan cara publikasi melalui jejaring sosial dan distribusi leaflet tentang Rumah Sehat ke berbagai elemen masyarakat.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilakukan proses peningkatan kapasitas terapis secara intens melalui pendampingan oleh staf klinik.

Klinik juga melakukan pendidikan di komunitas untuk pembatra dan perempuan kelompok di 3 kabupaten/kota. Selain itu, secara finansial, kelompok pembatra dan perempuan di komunitas mulai mendapatkan penambahan pendapatan keluarga dari hasil penjualan produk herbal yang mulai dipasarkan.

Peringatan 16 Hari Aktivisme Padang

Dalam rangka Peringatan 16 Hari Aktivisme dilaksanakan Aksi Bersama dan Dialog Publik dengan tema ***"Memperkuat Komitmen Bersama Dalam Mendukung Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Barat"*** pada tanggal 10 Desember 2016 di Hotel Grand Zuri, Kota Padang.

Rangkaian kegiatannya antara lain: ***(1)*** Aksi teatrikal drama tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan (ranah domestik dan publik) dari perwakilan JarPUK Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, ***(2)*** Pemaparan dari Para Pihak (stakeholders) untuk mendukung penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Lalu ***(3)*** Merumuskan dan menyepakati rekomendasi bersama sebagai upaya mendukung penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan ***(4)*** Stempel Cap 5 Jari sebagai simbol stop kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 60 orang yang terdiri dari kader lokal (CO) masing-masing wilayah, perwakilan JarPUK, perwakilan Forum Perempuan Muda, perwakilan FKPAR Sumbar, Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, Pengurus P2TP2A Kota Padang, Badan PMPKB Kota Padang (Pengelola Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/ PATBM), Presidium Nasional KPI (perwakilan KPI Sumbar), Konsil LSM Indonesia, PKBI Sumbar, Media (Radio Warna FM).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERMAMPU

Dana yang masuk untuk program HKSR PERMAMPU untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 10.121.511.775,- dengan rincian: dana program dan institutional cost sebesar Rp 9.369.572.652,- dana corefund sebesar Rp 751.939.123,-.

Serapan dana secara rinci oleh 8 lembaga per November 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Lembaga	Budget		Realisasi		%	
		Program	Corefund	Program	Corefund	Program	Corefund
1	FLOWER	1.083.625.000	210.126.200	799.460.802	108.583.938	73,78	51,68
2	PPSW	949.010.400	189.640.000	730.874.642	86.547.622	77,01	45,64
3	LP2M	793.300.000	156.105.000	579.869.739	61.338.787	73,10	39,29
4	APM	872.831.000	165.000.000	577.051.412	68.461.144	66,11	41,49
5	CP WCC	1.072.806.000	210.400.050	936.874.878	85.922.854	87,33	40,84
6	WCC Palembang	804.160.000	149.160.050	376.884.064	45.152.574	46,87	30,27
7	DAMAR	920.030.000	180.277.900	721.632.690	89.902.967	78,44	49,87
8	PESADA	1.487.805.000	283.612.800	1.036.792.281	112.445.754	69,69	39,65
9	Host	1.559.110.600	275.000.000	1.325.719.160	93.583.485	85,03	34,03
	Jumlah	9.542.678.000	1.819.322.000	7.085.159.668	751.939.125	74,25	41,33

Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput



⌘ FKPAR PROVINSI ACEH

Rapat koordinasi Pengurus FKPAR di 12 kabupaten/kota dilakukan secara parsial di masing-masing wilayah untuk mendiskusikan secara mendalam terkait perkembangan, kendala dan strategi dalam menjalankan rencana kerja FKPAR yang telah disepakati.

Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi dan konsolidasi Pengurus untuk optimalisasi kinerja guna mendukung pencapaian target forum.

Sejak Mei 2016 sampai dengan saat ini, Pengurus FKPAR melakukan pendataan dengan menggunakan form pendataan perlindungan sosial dan hukum yang telah disepakati, tujuannya agar FKPAR memiliki baseline data terkait kondisi perempuan di masing-masing wilayah sebagai referensi untuk melakukan advokasi pemenuhan hak-hak perempuan, terutama terkait kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual.



Dok. Flower Aceh

Upaya mendorong kebijakan agar berpihak pada perempuan desa juga dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya audiensi dengan 7 orang anggota legislatif perempuan di DPR Aceh dan 2 orang di DPR Kota Banda Aceh dan Aceh Besar pada akhir Oktober 2016.

Pertemuan ini diawali dengan penjelasan tentang FKPAR, tujuan audiensi, dan perkenalan pengurus FKPAR yang mengikuti kegiatan audiensi. Selanjutnya Pengurus FKPAR Aceh secara bergantian menyampaikan persoalan perempuan yang dialami oleh perempuan di desa berdasarkan hasil pendataan selama ini.

Persoalan yang disampaikan pada forum ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:

a. Masih sulitnya perempuan di beberapa desa mendapatkan layanan administrasi (kartu BPJS dan e-KTP). Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala teknis, misalnya ketidaktersediaan blangko KTP, tidak terdata di desa sehingga kartu BPJS tidak dapat dikeluarkan, menikah siri sehingga tidak mendapatkan akta nikah, dll.
b. Partisipasi perempuan dalam politik dan wilayah publik mulai meningkat di Aceh, namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh perempuan. Jumlah perempuan di instansi pemerintahan dan organisasi desa masih minim, sehingga belum mampu melakukan perubahan signifikan bagi kepentingan dan kebutuhan perempuan di desa.
c. Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan pemenuhan HKSR perempuan yang belum dijalankan secara konfrehensif dan maksimal.
d. Angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh setiap tahunnya meningkat. Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231 Gerakan Perempuan Aceh, selama tahun 2011-2013 mencatat 706 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Aceh; pada tahun 2011, tercatat 263 kasus, pada tahun 2012 meningkat menjadi 298 kasus, dan pada tahun 2013 menjadi 228 kasus.
e. Perempuan di desa belum mendapatkan akses maksimal yang mendukung kemandirian ekonomi. Perempuan terkendala dalam pengembangan usaha karena keterbatasan modal, pasar yang tidak mendukung, dan pola promosi yang tidak maksimal.

Pada kesempatan ini juga disampaikan harapan perempuan akar rumput terhadap Anggota Legislatif perempuan untuk lebih memaksimalkan peran kedewanannya, memastikan agar kebijakan dan anggaran lebih berpihak kepada perempuan, dan melakukan pengawasan secara optimal untuk memastikan institusi terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dapat bekerja secara maksimal dan tepat sasaran.

Anggota Legislatif perempuan menyampaikan apresiasi atas inisiatif FKPAR dan pada penghujung pertemuan, Ibu Dr. Mariati sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPR Aceh menyampaikan harapan agar FKPAR dapat mendukung kerja-kerja mereka dengan menyediakan data pendukung yang seperti hari ini disampaikan, sehingga proses-proses pembangunan dan perdamaian di Aceh mengakomodir kebutuhan perempuan.

⌘ FKPAR PROVINSI SUMATERA UTARA

FKPAR terlibat dalam sosialisasi hasil survey skema JKN tahap 2 dalam kaitannya untuk kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan seksual & reproduksi. Total peserta 47 orang, 35 perempuan & 12 laki-laki).

Masyarakat semakin memahami adanya JKN dan menyadari pentingnya perubahaan kepesertaan PBI, karena masih ditemukan masyarakat miskin tidak menjadi peserta PBI.

Masyarakat di 2 desa merumuskan secara partisipatif ukuran kemiskinan menurut desa tersebut, yang tentu saja berbeda dengan indikator kemiskinan menurut Negara. FKPAR Pesada juga ikut serta dalam kegiatan Konsolidasi FKPAR Dampingan seluruh lembaga Permampu yang dilaksanakan di Pekanbaru.



Dok. PESADA

Semangat dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan tampak dalam karnaval yang dilaksanakan, di mana orasi dilakukan dengan penuh semangat oleh semua peserta dan mendapat perhatian dari public setempat.

⌘ FKPAR PROVINSI RIAU

FKPAR Riau melakukan kampanye anti kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan 16 Hari anti kekerasan terhadap perempuan yang di peringati mulai tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember.

Peringatan ini sebagai bentuk kegiatan kolektif untuk melawan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan penguatan FKPAR RIAU dilaksanakan pada tanggal 7–8 Desember 2016 di Hotel Grand Zuri Pekanbaru. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar lokakarya dan audiensi di Kantor BP3AKB Provinsi Riau.

Kegiatan pertemuan FKPAR RIAU di hadiri pengurus dan anggota FKPAR Rohil, Pekanbaru, Riau dan kelompok dampingan yang ada di Kampar dengan jumlah peserta 52 orang.

Dalam kegiatan Pertemuan FKPAR RIAU narasumber yang hadir yaitu dari Dinas Kesehatan Propinsi Riau membahas mengenai SPM Kesehatan perempuan dan Anggota DPRD Propinsi Riau Komisi E membahas mengenai Ranperda Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

FKPAR RIAU juga melakukan rangkaian kegiatan salah satunya adalah audiensi FKPAR Riau yang dilaksanakan di kantor BP3AKB Propinsi Riau untuk mengkampanyekan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan mendorong terbitnya Perda anti kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Propinsi Riau.

Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh FKPAR, antara lain yaitu:

1. Melakukan pendataan BPJS, KK, KTP dan Jamksesmas bagi anggota kelompok
2. Audensi ke kepenghuluan untuk memperoleh informasi dana desa
3. Mengikuti Musrembang Desa
4. Mencalonkan diri untuk menjadi pemipin lokal (RT, RW dan BPK)

FKPAR sudah banyak berinisiatif dan berkembang, di mulai dari pendataan warga miskin, juga sudah berhasil mengadvokasi terutama dalam dana desa melalui RPJMDes. Dari advokasi sudah melakukan kegiatan di tingkat desa dimulai dengan audiensi ke bapak penghulu.

Dari Hasil pertemuan ini disepakati Rencana tindak lanjut FKPAR tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Dok. PPSW Sumatra, Riau

1. Mencari informasi lembaga layanan untuk pemenuhan HKSR perempuan dan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Peningkatan kapasitas perempuan dalam mengakses informasi dan layanan HKSR

perempuan dan penanganan pertama korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Membangun jaringan/mitra kerja strategis baik pemerintah maupun swasta dalam pemenuhan HKSR perempuan dan penanganan pertama korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mendorong pemerintah agar segera menyusun PERDA pelaksanaan SPM bidang kesehatan dan PERDA Anti Kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan

Dengan demikian FKPAR Rokan Hilir, Pekanbaru dan Riau sepakat akan melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat bersama ini. FKPAR juga akan menjalin hubungan kerja sama dengan intansi pemerintah terkait untuk mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memenuhi HKSR perempuan serta mampu melindungi perempuan Riau dari semua bentuk kekerasan.

⌘ FKPAR PROVINSI SUMBAR

FKPAR Sumatera Barat yang merupakan gabungan dari perempuan dampingan dari lima LSM Sub Mitra MAMPU, beberapa bulan terakhir tidak berjalan dengan maksimal. Pertemuan rutin FKPAR tidak terlaksana pada waktu yang telah disepakati. Salah satu kendala yang ditemui adalah susahnya mencari waktu yang bisa mempertemukan semua anggota FKPAR disamping memang kurangnya komunikasi antar sesama anggota FKPAR.



Dok. LP2M

Beberapa anggota dampingan LP2M yang baru terlibat dalam kegiatan FKPAR juga masih kurang memahami tentang keberadaan FKPAR. Kondisi ini membuat LP2M berinisiatif untuk tetap mengadakan pertemuan FKPAR walaupun khusus untuk perempuan akar rumput dampingan LP2M saja dengan harapan anggota FKPAR dampingan LP2M tetap bisa diperkuat serta tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Ditengah kondisi perkembangan FKPAR yang sedikit lambat, FKPAR dampingan LP2M tetap aktif dibeberapa kegiatan dan advokasi dengan Pemerintah daerah.

Dalam tiga bulan terakhir FKPAR aktif terlibat dalam kegiatan: Perayaan dan Konsolidasi FKPAR Dampingan Permampu ***"Berakar Kuat, Berjuang Bersama Melawan Pemiskinan Perempuan"*** di Pekanbaru, 18 – 20 Oktober 2016 serta pertemuan FKPAR Tanggal 11 November 2016 dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas FKPAR, pertemuan gabungan FMS Sumatera Barat Tanggal 6 Desember 2016 dan turut berpartisipasi mendorong serta memberi masukan untuk pembangunan yang responsif gender. Dalam rangka memperingati hari pergerakan perempuan (Hari Ibu) pada tanggal 22 Desember 2016 FKPAR juga terlibat dalam Diskusi Publik Keluarga Peduli HKSR dengan memperkuat dukungan keluarga untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR di Sumatera Barat.

Menjelang penutupan tahun 2016 FKPAR juga terlibat dalam kegiatan audiensi/hearing FMS Kota Padang kepada Walikota Padang dengan tema ***"Memperkuat Komitmen bersama untuk mendukung Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan"*** di Kota Padang Tanggal 29 Desember 2016

Selain mengikuti berbagai kegiatan diskusi dan dialog anggota FKPAR juga turut serta dalam advokasi kepada pemerintahan daerah untuk alokasi pemberdayaan perempuan. Advokasi yang dilakukan anggota FKPAR berhasil mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk penguatan ekonomi di wilayah tempat tinggalnya.

⌘ FKPAR PROVINSI JAMBI

FKPAR Merangin pada tanggal 17 September 2016 melakukan review terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan serta mendiskusikan beberapa perencanaan yang tidak terealisasi. Dari hasil diskusi ini juga di pahami bahwa selama ini FKPAR belum dapat mandiri dalam melaksanakan kegiatan, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan oleh pendamping dalam hal ini staf APM.

Selain lemahnya kemandirian, kurangnya keaktifan pengurus juga menjadi masalah sehingga perlu adanya penyegaran kepengurusan. Setelah diadakan evaluasi secara sederhana dan diskusi tugas pokok serta fungsi antara pengurus dan pelaksana.

Bertempat di Pekan Baru, pada tanggal 18 – 20 Oktober 2016, anggota FKPAR Jambi berjumlah 10 orang mengikuti kegiatan konsolidasi tingkat internal dampingan Permampu. Kegiatan dengan tema ***"Berakar Kuat, Berjuang Bersama Melawan Pemiskinan Perempuan"***, ini bertujuan untuk memahami peran, fungsi dan posisi dalam pengorganisasian perempuan akar rumput. Selain itu pentingnya memperkuat

pemahaman dan kesadaran atas perjuangan bersama untuk melawan KTP/Kekerasan Seksual yang berdampak pada HKSR, khususnya yang dialami perempuan pedesaan, perempuan miskin dan yang terpinggirkan. Dengan pertemuan ini FKPAR Jambi merasakan persatuan sesama kelompok-kelompok perempuan dampingan Permampu lainnya serta sebagai ajang untuk berbagi pengalaman dan saling belajar dalam membangun kekuatan kolektif antara FKPAR dari 8 provinsi lainnya seSumatra.



Dok. APM Jambi

FKPAR Jambi juga menyelenggarakan dialog dan konsolidasi dengan tema ***"Perempuan Berjuang Bersama melawan Pemiskinan"***. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 Desember 2016 ini bertempat di Aula Wisma Garuda Mandiri - Merangin Jambi.

Dialog menghadirkan 3 orang narasumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosnakertrans, BNI 46 cabang Bangko, dan Ibu Helmi Rahmawati (Pengurus Permampu) sebagai moedarator. Kegiatan diikuti oleh 45 orang yang berasal dari unsur pengurus, pelaksana, pendamping dan perwakilan dari kelompok perempuan dampingan APM dan KPI Jambi sebagai anggota FKPAR propinsi Jambi.

Dinas kesehatan menekankan bahwa negara ingin mendekatkan akses kesehatan dengan memberikan jampersal untuk yang miskin atau kurang mampu untuk menangulangi kematian ibu saat bersalin. Narasumber dari Sosnakertrans menegaskan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan cara mengaksesnya dengan laporan dari desa berstandar SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), dan ditandatangani Sosnakertrans.

Dinas Sosnakertrans juga memaparkan tentang pemberdayaan/kursus-kursus untuk kelompok usaha bersama. Mereka akan memberikan bantuan dalam bentuk ternak, atau bentuk usaha lainnya yang bersifat mikro pada kelompok masyarakat yang proposalnya sudah disetujui.

Sedangkan narasumber dari BNI 46 Cabang Bangko menyampaikan Materi KUR (Kredit Usaha Rakyat), yang intinya saat ini melalui program KUR banyak perempuan sudah mandiri dan bisa menabung. Setelah sesi tanya jawab dari peserta ke narasumber, forum FKPAR melakukan diskusi Pleno tentang evaluasi kinerja tahun 2016 dan menyusun rencana kegiatan tahun 2017.

⌘ FKPAR PROVINSI BENGKULU

Pada tanggal 24-25 November 2016, FKPAR Propinsi Bengkulu dampingan Cahaya Perempuan WCC mengadakan konsolidasi yang bertemakan tema ***"Lindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual dan Perkawinan Anak"*** agar para pihak secara bersama dapat membuat perubahan bagi kehidupan perempuan yang sehat, otonom dan produktif.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama FKPAR tingkat Provinsi Bengkulu di tahun 2016 untuk menyuarakan kepentingan perempuan dalam berbagai upaya pengurangan kemiskinan yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan khususnya Kekerasan Seksual dan Perkawinan Anak di Bengkulu.

Dengan modal telah berkembangnya sebaran dan cakupan kelompok perempuan akar rumput dampingan Cahaya Perempuan WCC di 15 Desa/ Kelurahan yang tersebar di 3 Kabupaten/ Kota (Rejang Lebong, Seluma dan Kota Bengkulu) dengan jumlah perwakilan peserta sebanyak 88 orang.

Harapannya dapat memperkuat gerakan pengurangan kemiskinan dengan cara penguatan ekonomi kelompok perempuan melalui kelompok simpan pinjam (CU), pendidikan dan penyadaran kritis di kelompok, dan aksi kolektif untuk advokasi pemenuhan dan perlindungan HKSR perempuan


Dok. Cahaya Perempuan WCC

Konsolidasi ini dikemas dalam beberapa rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Diskusi Panel difasilitasi oleh moderator DR. Edra Satmiadi. Salah seorang narasumber dalam diskusi ini adalah bapak Wakil Gubernur

Bengkulu (DR. Rohidin Mersyah). Poin penting dari Pidato Wakil Gubernur Bengkulu sebagai yakni :

- Program penguatan ekonomi perempuan bagi kelompok perempuan di desa/kelurahan tidak hanya bicara untuk mengatasi persoalan perempuan tetapi sebagai langkah masuk untuk mengubah pola pikir masyarakat/ perempuan yang berkeadilan sosial dan meningkatan status sosial perempuan
- Program pemberdayaan juga harus melibatkan laki-laki agar laki-laki sadar atas perannya
- Gender bukan isu dari barat dan tidak bertentangan dengan agama terutama Agama Islam
- Perlu upaya bersama untuk membongkar budaya patriarkhi agar kekerasan terhadap perempuan menurun di Bengkulu yang dimulai dari keluarga

2. Penguatan kelembangaan FKPAR yang difasilitasi oleh Personil Cahaya Perempaun WCC untuk membangun pemahaman dan kesadaran bersama akan pentingnya kekuatan & agenda kolektif perempuan akar rumput
3. Karnaval Adat digunakan sebagai ajang menyuarakan kepentingan perempuan dalam berbagai upaya pengurangan kemiskinan yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan khususnya Kekerasan Seksual dan Perkawinan Anak di Bengkulu. Kegiatan aksi dimulai dengan berkumpul di Mesjid Jamik Kota Bengkulu menuju kantor Walikota Bengkulu dengan membawa atribut kampanye dalam bentuk pamflet, stiker, dan spanduk.
4. Pendidikan Kader Perempuan: Pengalaman & Tantangan Dalam Pengorganisasian Perempuan di Pedesaan & Perkotaan (sebagai Perempuan Pelaku Perubahan) oleh Narasumber : Irna Riza Y, S.Sos (Sekwil KPI Bengkulu).

⌘ FKPAR PROVINSI SUMSEL

FKPAR Sumsel hampir berusia 2 tahun. Selama kurun waktu itu FKPAR Sumsel terus melakukan upaya penguatan forum dan melakukan kerja-kerja yang menjadi mandat FKPAR Sumatera maupun mandat FKPAR Sumsel.

Selain melakukan pertemuan reguler berupa rapat pengurus dan evaluasi, FKPAR Sumsel juga melakukan diskusi kritis tematis dan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Menjelang akhir tahun 2016, tepatnya tanggal 16-17 Desember 2016, FKPAR Sumsel melakukan Konsolidasi, Evaluasi dan Penguatan Forum yang bertujuan memperkuat FKPAR Sumsel, mengevaluasi tantangan dan upaya yang harus dilakukan serta melakukan konsolidasi beberapa hal, salah satunya melakukan pergantian penggurus FKPAR.



Dok. WCC Palembang

Dalam beberapa diskusi terungkap bahwa sebagian besar kebijakan yang dibuat tidak pro perempuan. Akibatnya kepentingan perempuan banyak yang belum tersentuh. Sensitifitas dan kepekaan melihat persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan sulit dilakukan oleh laki-laki yang tidak merasakan langsung realitas kehidupan yang dirasakan perempuan. Perempuan seringkali diposisikan sebagai objek kepentingan, tanpa mampu ikut andil menentukan arah kebijakan.

Oleh karena itulah pada pertemuan konsolidasi, evaluasi dan penguatan FKPAR Sumsel kali ini dibahas cukup mendalam mengenai kepemimpinan perempuan. Tidaklah berlebihan apabila perempuan, terutama perempuan akar rumput yang sudah dididik dan dilatih terlibat dalam politik maupun mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, kades misalnya.

Selain diskusi mengenai kepemimpinan perempuan, pada pertemuan ini juga dilakukan diskusi kelompok membahas capaian dan tantangan serta rencana tindak lanjut FKPAR Sumsel sepanjang tahun 2016. Dukungan yang diberikan berbagai pihak pada tahun 2016 ini makin meluas dan intensif, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah merasakan manfaat serta memerlukan kerja-kerja FKPAR Sumsel.

FKPAR Sumsel menyadari bahwa tantangan yang dihadapinya cukup besar, baik internal maupun eksternal. Selain kemampuan merespons secara efektif persoalan-persoalan perempuan, tantangan eksternal yang dihadapi FKPAR Sumsel antara lain adalah: meraih dukungan optimal dari pemerintah daerah dalam menjalankan mandat organisasi termasuk dukungan finansial yang memadai.

Tantangan internal yang menonjol dan perlu diatasi oleh FKPAR Sumsel adalah merawat dan

mengembangkan capaian kelembagaan yang sudah ada, serta terus mengupayakan penguatan kapasitasnya baik menyangkut struktur lembaga maupun budaya kerja yang kondusif demi tercapainya tujuan terbentuknya FKPAR Sumsel.

⌘ FKPAR PROVINSI LAMPUNG

Gerakan Perempuan Lampung sebagai Forum Komunitas perempuan akar rumput tingkat Provinsi memiliki rencana kegiatan di semua tingkatan yang terencana dan berkesinambungan.

Pendidikan jenjang pertama ***"Pendidikan Adil Gender dan Anti Kekerasan"*** dilakukan melalui pertemuan, diskusi-diskusi secara periodik di kelompok. Penyelenggaraan pendidikan jenjang kedua ***"Pendidikan Feminisme dan Analisa sosial"*** bertujuan, anggota semakin yakin femisnisme sebagai ideologi untuk memperjuangkan hak perempuan, dan memiliki kemampuan melakukan analisa sosial yang berperspektif feminisme untuk merumuskan masalah strategis dan strategi advokasi hak dasar perempuan.



Dok. DAMAR Lampung

Kegiatan ini diselenggarakan pada 8-11 Oktober 2016 dengan melibatkan 30 anggota perwakilan serikat 6 kab/kota (SPBL, SEPALAS, FAKTA Tanggamus, KEPAL UTARA, Perempuan Timur, FAK Lampung Tengah) yang telah lulus Pendidikan Adil Gender.

Peserta pendidikan adalah anggota yang dipersiapkan menjadi calon kader di wilayah masing-masing di 6 kab/kota dalam Gerakan Perempuan Lampung dan memiliki komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut.

FKPAR Kabupaten Lampung Utara – Kepal Utara

Inisiasi KEPAL Utara dalam rangka memperingati Hari lahir Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara) bertepatan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Inisiasi tersebut diwujudkan dengan berbagi bunga dan slogan ***"Gerak Bersama, Dukung Pengesahan Penghapusan RUU Kekerasan Seksual".*** Sasaran Kampanye 16 HAKTP adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat.

Pembagian bunga dimulai dari kantor Pemerintah daerah Lampung Utara dan berhasil bertemu dengan asisten II bidang Ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat agar juga terlibat aktif Mendesak segera disah kan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum menjadi prioritas dalam Prolegnas.

Selama tahun 2015, Kesatuan perempuan Lampung Utara telah mendampingi 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada Januari – Oktober 2016 mendampingi 17 kasus.

FKPAR Kabupaten Lampung Tengah

Dalam rangka memperingati hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2016 yang merupakan hari perempuan yang diwujudkan untuk memperingati kongres perempuan pertama yakni 22 Desember 1928 dan merupakan titik awal lahirnya gerakan perempuan Indonesia.

FKPAR Lampung tengah aktif melakukan aksi bersama dengan Puskesmas, Tokoh agama, Yayasan Srikandi dan PKK di kecamatan Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah. Rangkaian kegiatan meliputi

Senam bersama pada tanggal 21 Desember 2016 bekerjasama dengan Puskesmas Kec. Bandar Surabaya dengan melibatkan 170 perempuan yang terpapar informasi terkait hak kesehatan reproduksi

Pengajian akbar dengan melibatkan tokoh agama yang telah diintervensi oleh DAMAR dari tahun 2015. Bapak Wahyudi menguatkan perspektif 125 ibu-ibu di kec. Bandar Surabaya dalam melakukan tafsiran akan kaidah-kaidah agama Islam dalam menjaga dan melindungi kesehatan seksual dan reproduksi

Orasi di depan Puskesmas Kec. Bandar Surabaya yang dilakukan oleh 46 perempuan akar rumput baik pengurus FKPAR Kab. Lampung Tengah dan perempuan muda dalam rangka menuntut Hak atas Kesehatan Reproduksi adalah Hak asasi Manusia sehingga mendorong implementasi SPM terkait layanan HKSR. ■


TEMA 4
KESEHATAN REPRODUKSI
PERMAMPU
HKSR
BELUM DIPENUHI DILINDUNGI DAN DIHORMATI OLEH BERBAGAI PIHAK
KURANG INFORMASI HKSR
KURANG DUKUNGAN NEGARA..
PP No. 61 TAHUN 2019
KESEHATAN REPRODUKSI
HASIL PENELITIAN..
MATERI TIDAK ADA CAKUPAN HKSR
AYAH HARUS KERJA..
KURANG DUKUNGAN SUAMI, KELUARGA DAN LINGKUNGAN..
TAK ADA PILIHAN U/ MENERUSKAN ATAU ABORSI !
AKIBAT...
PEREMPUAN MELALUI KEHAMILAN DILUAR KEMAMPUAN TUBUHNYA...
MENAMBAH BEBAN HIDUP KELUARGA..
PEMISKINAN BERLANJUT...
KEGIATAN
SASARAN
ADVOKASI ATAS HKSR
PENGUATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT
PEREMPUAN MUDA
REMAJA PEREMPUAN
TOKOH AGAMA
PENYEDIA LAYANAN HKSR
TOKOH ADAT
KOMITE SEKOLAH
OSIS
TINJAU KEMBALI PP No 61/2019 MENGGUNAKAN PERSPEKTIF PEREMPUAN



FORUM MULTI STAKEHOLDER

⌘ FMS ACEH

"Kami akan memasukan kegiatan sosialisasi HKSR dalam APBG 2017"

- Geuchik Ateuk Deah Tanoh -

Pertemuan FMS di Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh yang dihadiri oleh perwakilan Aparatur Desa, perwakilan kelompok perempuan, dan BPJS membahas tentang kepemilikan kartu BPJS yang sebelumnya menjadi masalah, karena 10% warga di desa-desa kecamatan Meuraxa belum memiliki kartu BPJS.

Dalam pertemuan tersebut BPJS menjelaskan mekanisme BPJS pada peserta kegiatan FMS, adanya pembahasan mengenai penggunaan dana desa untuk kebutuhan HKSR perempuan ditingkat desa, dan juga membahas mekanisme pelibatan perempuan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di desa.

Pertemuan rutin FMS Kota Banda Aceh membahas serta mengkritisi Pergub No. 49 Tentang Pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja perempuan, yang menghasilkan beberapa catatan penting beberapa rekomendasi yaitu:

- Memasukan pasal yang menjelaskan tentang pemberian tunjangan melahirkan bagi perempuan melahirkan (untuk peningkatan gizi ibu dan anak)
- Memastikan adanya jaminan terhadap perempuan yang cuti untuk mendapatkan kesempatan promosi dll
- Penting dilakukannya penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pergub ini
- Penyesuaian jam kerja bagi perempuan (jam masuk dan pulang)
- Pergub ini harus menjangkau perempuan pekerja pada sektor swasta
- Memasukan pasal yang memastikan peran aktif suami untuk pemenuhan hak ASI ekslusif anak
- Mencantumkan pasal yang menjelaskan tentang pengawasan dan sanksi secara jelas dan eksplisit bagi pihak-pihak yang melanggar Pergub
- Mencantumkan pelaksanaan monev terhadap implementasi Pergub minimal 6 bulan sekali
- Mencantumkan standarisasi penyediaan ruang laktasi
- Penting memasukan pasal yang memuat upaya pelayanan pranatal bagi perempuan melahirkan sehingga dapat mempelancar ASI

Berbeda dengan FMS Banda Aceh, FMS Aceh Utara membahas tentang sistem pendampingan korban kekerasan seksual dan KDRT, penguataan perempuan melalui perencanaan desa, kajian kesehatan dalam perspektif Islam, pengelolaan anggaran desa dan pelibatan Aparatur dan Tokoh Desa dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di desa.

Sedangkan FMS di Pidie mendiskusikan tentang upaya-upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan desa serta mendorong peningkatan anggaran desa yang berpihak pada perempuan.



Dok. Flower Aceh

Pertemuan Perempuan Pejabat Publik/Femokrat dilakukan di Banda Aceh dengan menghadirkan perempuan pejabat publik dari lintas instansi/sektoral di Kota Banda Aceh.

Dalam pertemuan femokrat kota Banda Aceh menyepakati pembentukan Forum Perempuan Pejabat Publik Banda Aceh sebagai wadah komunikasi, koordinasi, berbagi informasi, penguatan kapasitas, dan kerjasama dalam rangka percepatan pemenuhan hak perempuan di Banda Aceh, termasuk HKSR perempuan.

FGD Tokoh Adat di Banda Aceh membahas tentang HKSR dalam perspektif adat. Pertemuan ini dihadiri oleh Tokoh Adat dari 4 desa wilayah dampingan Flower Aceh yang terletak di kecamatan Meuraxa dan Lueng Bata. Dalam FGD kali ini didapat rekomendasi bahwa pemangku kepentingan ditingkat desa akan membuat peraturan desa (reusam) tentang peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi dengan melibatkan keterwakilan perempuan.

Tokoh Adat yang hadir juga berpendapat pentingnya sosialisasi dan pendidikan tentang kespro kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat serta Aparatur dimasing-masing desa, sedangkan di sektor anggaran desa akan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas desa untuk layanan kesehatan reproduksi.

Selain FGD regular dengan pemangku adat, Flower Aceh juga melakukan kunjungan silaturahmi dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dalam rangka membangun kerjasama antara Flower Aceh dengan MAA, serta bersinergi dalam melakukan kerja-kerja upaya mendorong HKSR perempuan.

Pada kegiatan ini Flower Aceh memperkenalkan program HKSR yang sedang berjalan dan mendapatkan dukungan yang baik dari Ketua MAA kota Banda Aceh beserta jajarannya.

"Ini merupakan pucuk di cinta ulam pun tiba, kita memang ingin bersinergi program dalam meningkatkan peran ibu-ibu di masyarakat dan kedatangan Flower Aceh merupakan hal yang kami tunggu"

- Wakil Ketua 1 MAA Kota Banda Aceh -

⌘ FMS SUMATERA UTARA

Penguatan Kapasitas FMS dampingan Pesada

Pesada melaksanakan 2 kali lokakarya penguatan perspektif pengurus Forum Multi Stakeholder tentang standar pelayanan minimal kesehatan di Puskesmas berdasarkan PMK No 43 tahun 2014 tentang SPM bidang Kesehatan.

Melalui lokakarya ini, peserta menjadi paham tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Puskesmas (fungsi, tujuan dan cakupan). Peserta juga semakin dikuatkan mengenai peran dan fungsi mereka baik sebagai anggota Forum Multi Stakeholder maupun sebagai pemberi layanan.

Peserta juga menyadari pentingnya memantau implementasi SPM Kesehatan di Puskesmas wilayah masing-masing terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi perempuan.

MOU antara Pesada dan Gereja Angowulao Faawosa Kho Yesu (AFY): Program Peningkatan Kepedulian HKSR, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Adanya MoU ini dilatarbelakangi rendahnya posisi perempuan dalam seluruh rangkaian adat istiadat dan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Dalam setiap tahap adat tersebut, perempuan hanya menjadi objek, di mana keberadaan perempuan hanya untuk kebahagiaan pihak laki-laki.

Misalnya pada perkawinan. Perkawinan di Nias pada umumnya terjadi karena kehendak orangtua/ keluarga besar atau dijodohkan. Perkawinan tidak mempertimbangkan umur perempuan dan laki-laki, sehingga pernikahan di bawah 15 tahun masih terjadi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Tujuan utama perkawinan adalah mengejar adanya keturunan terutama anak laki-laki sebagai pewaris, sehingga di Nias jumlah dan jarak kelahiran anak sangat tergantung kepada ada atau tidak anak laki-laki. Ditemukan bahkan ada keluarga yang memiliki satu anak setiap tahunnya.

Masyarakat Nias juga memberlakukan ***perkawinan levirate*** yakni dinikahi oleh saudara suami (yang telah meninggal). Pada kasus-kasus tertentu perempuan dapat saja dinikahkan sebagai pembayaran hutang, atau karena yatim-piatu, dll.

Secara khusus, perempuan yang hamil di luar nikah atau kedapatan berzinah, juga dapat saja dinikahkan kepada laki-laki sembarangan/siapa saja, karena tujuannya adalah untuk tidak menambah malu keluarga. Pernikahan perempuan-perempuan yang dicap 'berdosa' itu tidak dilaksanakan melalui adat dan tanpa dipertanyakan kepada perempuan itu sendiri (dalam hal ini terjadi unsur pemaksaan).



Dok. PESADA

Terdapat perbedaan dalam pemberian nasehat (***Fotu***) bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nasehat bagi perempuan seperti: 1). Kemanapun anda pergi maka harus diinformasikan kepada ibu mertua, 2). Memasak apa hari ini harus ditanyakan kepada ibu mertua, 3). Melayani suami dalam membuat sirih, memberi minum, dan menghidangkan makanan adalah contoh-contoh yang menjadi kewajiban.

Salah satu nasehat perkawinan bagi laki-laki adalah ***"Na ö'bözi nonoma andre na faudu ami ba na i'olembai daru-taru nawu ba böi bözi sa'ae ia me salahi ninania daö sanolo yaia."*** Artinya "Apabila engkau memukul istrimu dan ia sampai di salah satu tiang rumah atau dapur, dll maka engkau bisa hentikan untuk memukulnya karena itu sebagai pengganti orangtuanya". "Tiang" adalah penopang sebuah rumah. Bagi orang Nias tiang rumah atau tiang dapur dianggap/diistilahkan sebagai "orangtua yang menopang keluarga".

Dalam ***Sebum Fotu*** (Nasehat pernikahan) kepada laki-laki dikatakan bahwa apabila istri sudah berada di tiang rumah atau tiang kamar tidak boleh dipukul karena dianggap bahwa isterinya tersebut sudah berlindung kepada orangtuanya. Apabila suaminya tetap memukul isterinya meski isterinya telah berada di tiang rumah atau tiang kamar, maka suami akan mendapatkan denda adat sesuai dengan aturan hukum adat.

Selama ini di masyarkat Nias ada anggapan bahwa adalah hal yang wajar untuk memukul perempuan karena nasehat perkawinan tersebut. Namun dalam diskusi yang dilakukan dengan tokoh adat kami melihat bahwa nasehat pernikahan ini membuka peluang bagi laki-laki untuk memukul istrinya. sehingga kemudian disepakati bahwa dalam ***Fotu*** akan dikatakan bahwa laki-laki/suami tidak boleh memukul perempuan baik sebelum sampai di tiang rumah atau tiang kamar maupun dimana saja.

⌘ FMS RIAU

Propinsi Riau telah memiliki 3 Forum Multi Stakeholder (FMS) yaitu FMS Kabupaten Rokan Hilir, FMS Kota Pekanbaru dan FMS Propinsi Riau. Tujuan Pembentukan FMS ini dimaksudkan agar PPSW Sumatra mempunyai kelompok pendukung dari kalangan Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan kelompok perempuan akar rumput dalam mengadvokasi pemenuhan HKSR perempuan.

Setelah terbentuknya FMS ini, PPSW Sumatra telah melaksanakan berbagai kegiatan/diskusi untuk meningkatkan kapasitas personil FMS, baik di tingkat kabupaten/ kota maupun di tingkat propinsi.



Dok. PPSW Sumatra, Riau

Pada pertemuan untuk penguatan FMS antara lain, telah dilakukan penyadaran HKSR perempuan dan gender, penguatan kelembagaan FMS melalui pembentukan struktur kepengurusan FMS, melakukan sosialisasi HKSR untuk perempuan dan remaja di dalam lingkungan kerja setiap instansi, serta memperoleh legalitas dari Pemerintah seperti SK Walikota untuk FMS Kota Pekanbaru.

Saat ini PPSW Sumatra dan FMS sedang mendorong pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan mempertegas peran negara sebagai lembaga formal untuk bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu sejalan dengan UU Kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, bebas dari masalah 'stunting' dan malnutrisi; serta mengurangi angka kematian ibu.

Lebih lanjut, untuk mempercepat terpenuhinya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, pemerintah juga menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, yang masih membutuhkan langkah lanjutan untuk panduan pelaksanaan tehnis di semua level. Cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan termuat dalam indicator pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Oleh karena itu, PPSW Sumatra telah melaksanakan lokakarya 2 hari penuh untuk menguatkan posisi FMS sebagai bagian dari bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak kesehatan seluruh warga, khususnya HKSR Perempuan. FMS juga akan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan penyedia layanan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak – hak kesehatan seksual & reproduksi perempuan.

Lokakarya diikuti oleh 25 orang peserta dengan keseimbangan antara lembaga Negara dan tokoh masyarakat (adat/agama), FKPAR maupun jenis kelamin, yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Pekanbaru, Dumai, Kampar dan Siak. Nara sumber dalam Lokakarya ini adalah Dra.Agustiani dari P2TP2A Propinsi Riau.

⌘ FMS SUMBAR

Forum Multistakeholders (FMS) pada periode triwulan IV ini dalam program Advokasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) terlibat dan berperan aktif dalam beberapa kegiatan, yaitu: Pertemuan FMS gabungan dari tiga kabupaten/ kota dan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, serta FMS Kota Padang dalam kegiatan Dialog Publik dalam rangka 16 Hari Aktivisme

dan Audiensi Forum Multi Stakeholders (FMS) dengan Pemerintahan Kota Padang.

Tanggal 6 Desember 2016 pertemuan FMS gabungan dari tiga kabupaten/ kota dan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 35 peserta dari elemen pemerintah, Aparatur Penegak Hukum (APH), FKPAR, akademisi, Organisasi Non Pemerintah, narasumber dan panitia dari staf dan relawan LP2M.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Pangeran City mengangkat tema *"Mendorong komitmen bersama untuk Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Dalam Pembangunan Daerah untuk Mendukung Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Sumatera Barat".*

Materi disampaikan oleh tiga orang narasumber yaitu (1) Review Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Sumatera Barat oleh Badan BPMPrKB Provinsi Sumatera Barat, (2) Analisa Kebijakan PUG dan PPRG di Sumatera Barat oleh Dosen Fisipol Universitas Andalas, dan (3) Strategi Implementasi Kebijakan PUG dan PPRG di Sumatera Barat oleh Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).



Dok. LP2M

FMS kota Padang bersama dengan beberapa LSM dikota Padang (Konsil LSM, PKBI, LBH Padang), Pengurus Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, Forum Perempuan Muda (FPM) Provinsi Sumatera Barat, FKPAR Provinsi Sumatera Barat terlibat dalam Dialog Publik 16 Hari Aktivisme dalam rangka mendukung penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat.

Acara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2016 ini mengangkat tema *"Memperkuat Komitmen Bersama untuk Mendukung Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Barat".* Seluruh pihak yang hadir menyatakan kesepakatan:

1. Advokasi peningkatan anggaran untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan
2. Mendorong agar kasus-kasus perkosaan diselesaikan secara hukum
3. Mendorong regulasi/ kebijakan untuk memperkuat posisi perempuan dalam ranah pengambilan keputusan strategis
4. Perlu penegasan dan upaya sosialisasi secara terus-menerus untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan
5. Mendorong alokasi anggaran daerah untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan (pemberdayaan perempuan)
6. Membangun jaringan multistakeholders agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama
7. Perlu ada shelter yang kondusif bagi korban dalam proses penanganan dan pemulihan
8. Perlu psikolog dalam pendampingan korban dalam proses pemulihan
9. Mendorong biaya visum secara gratis bagi korban kekerasan
10. Re-interpretasi kembali penafsiran nilai-nilai agama dalam konteks hak-hak seksual dan reproduksi kepada Forum Tungku Tigo Sajarangan FTTS)
11. Mengusulkan kepada para bundo kanduang apabila akan memilih menantu, perlu melakukan tes darah sebagai upaya antisipasi para pengguna narkoba dan penyakit menular seksual
12. Menghidupkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari
13. Peningkatan kapasitas SDM kepolisian yang peka gender dalam penanggulangan kasus-kasus kekerasan
14. Mendorong ruang khusus bagi perempuan dan anak di tiap kantor kepolisian
15. Merumuskan perlindungan sementara bagi korban dalam penjelasan aturan hukum
16. Memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang legalitas peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat
17. Kita semua bisa menjadi konselor dengan menjadi pendengar yang baik
18. Kita semua harus mau untuk mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi
19. Memperkuat pemahaman aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan
20. Perlu sosialisasi kepada semua pihak, untuk

mengetahui mekanisme hukum dan pemeriksaan visum

21. Memberikan penyadaran kepada suami dan istri dalam pemilihan alat kontrasepsi yang tepat dan menjadi tanggung jawab suami-istri
22. Mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual (masuk dalam prolegnas dan segera disahkan menjadi UU) tahun 2017

Untuk menyampaikan beberapa kesepakatan yang sudah diperoleh dalam berbagai pertemuan FMS dilakukan Audiensi FMS Kota Padang kepada Wali Kota Padang pada tanggal 29 Desember 2016. FMS awalnya direncanakan akan diterima oleh Wali Kota Padang, namun terjadi perubahan sehingga yang berkesempatan untuk menerima audiensi ini hanya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang.

Pertemuan ini menjadi titik awal untuk membangun komunikasi dan koordinasi kepada Kepala Daerah dalam mendorong lahirnya kebijakan pemerintah untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan HKSR yang lebih baik di Kota Padang.

⌘ FMS JAMBI

FMS Kabupaten Merangin mulai menguat keberadaanya. Baik secara isu, struktur, maupun pemahaman bersama tentang pembagian peran masing – masing pihak. Pada tanggal 29 – 31 Agustus 2016 telah dilakukan lokalatih tentang Gender dan HKSR untuk anggota forum dan menghasilkan struktur kepengurusan, Tupoksi dan Rencana Kerja Tindak Lanjut FMS Kab.Merangin yang lebih jelas. Setelah lokalatih, FMS bersama APM melakukan audiensi kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan untuk melaporkan hasil lokalatih.

Kegiatan hearing dan audiensi untuk mendorong keluarnya kebijakan tentang HKSR juga di lakukan oleh FMS bersama APM ke pihak – pihak terkait seperti Biro hukum, Polres, Sekda, BPMPD dan RSUD Kabupaten Merangin. Sedangkan ke DPRD masih tertunda karena masih dalam proses penjadwalan ulang terkait kesibukan para anggota dewan.



Dok. APM Jambi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan atau lahirnya kebijakan dan program-program pemerintah yang mendukung pemenuhan dan perlindungan HKSR yang lebih baik. Untuk tingkat desa, BPMPD Kabupaten Merangin berjanji akan menekankan kepada para kepala desa akan adanya kesediaan anggaran yang mencukupi dari Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesehatan perempuan dan anak.

Dalam periode ini, selain kegiatan lokakarya, hearing dan loby, bersama Aliansi Perempuan Merangin forum juga telah melakukan diskusi kritis berseri. 12 Hak Kesehatan Reproduksi dan dampak Perkawinan diusia anak di kabupaten Merangin menjadi topik diskusi yang dilakukan pada November yang lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat analisis kritis yang peka gender oleh Forum Multi Stakeholders terkait dinamika isu HKSR di kabupaten Merangin.

⌘ FMS BENGKULU

Salah satu indikator perkembangan dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan adalah dengan terlaksananya diskusi kritis Forum Multi Stakeholder (FMS) dalam periode Juli – Desember 2016 di dua wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Seluma.

Berikut perkembangan FMS di beberapa wilayah dampingan Cahaya Perempuan WCC :

Kabupaten Rejang Lebong

Keberadaan FMS di Kabupaten Rejang Lebong telah dilegalformalkan oleh **Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.499.X Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Multi Stakeholder untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kesehatan seksual dan reproduksi.**

Adapun tugas FMS sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan promosi pemenuhan dan penegakan Hak kesehatan seksual dan reproduksi
2. Membangun sistem data informasi HKSR
3. Penyadaran dan pendidikan pada remaja dan ibu-ibu tentang HKSR
4. Melakukan dialog kebijakan antar pihak tentang mekanisme layanan BPJS dan JAMKESDA bagi ibu melahirkan dan anggaran untuk pelayanan KTP-A termasuk melatih melatih kelompok layanan berbasis masyarakat.

Keputusan Bupati Rejang lebong menyatakan bahwa FMS dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada APBN dan dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 08 Desember 2016 telah dilaksanakan diskusi kritis FMS Rejang Lebong di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam diskusi kritis FMS selain pembagian peran dan tanggung jawab dari anggota forum juga disepakati rencana program Dinas Kesehatan Rejang lebong Seksi KESGA dan KIA tahun 2017 untuk mengadakan Lokalatih Hak Kesehatan seksual dan Reproduksi (HKSR) Peka Gender bagi petugas medis di Rejang Lebong.



Dok. Cahaya Perempuan WCC

Kabupaten Seluma

FMS di Kabupaten Seluma telah mengadakan diskusi kritis sebanyak dua kali dalam periode Juli – Desember 2016. Adapun perkembangannya bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma menyambut keberadaan Forum ini dengan adanya **Keputusan Bupati Seluma Nomor. 440.805 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Multi Stakeholder Untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Kabupaten Seluma.**

Di dalam SK Bupati Seluma tersebut menyebutkan beberapa tujuan FMS yakni: 1). Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB), 2). Menurunkan tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas layanan pada perempuan korban, 3). Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bersama Pemerintah Daerah, mengkampanyekan isu HKSR.

Adapun kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem data informasi HKSR
2. Penyadaran dan pendidikan pada remaja dan ibu
3. Melakukan dialog kebijakan tentang mekanisme layanan bagi ibu melahirkan dan kebijakan anggaran untuk layaanan KTP-A termasuk paltihan kelompok layanan korban berbasis masyarakat.
4. Diskusi regular FMS
5. Membangun konsep desa sehat dan peduli kesehatan ibu dan anak
6. Pelatihan para tokoh agama dan adat tentang HKSR
7. Pelatihan peningkatan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan.
8. Penguatan ekonomi untuk perempuan miskin

Kota Bengkulu

Di Kota Bengkulu para Tokoh Agama dan Tokoh Adat serta kelompok perempuan dan Pemerintah Kota bergabung dalam Forum Multi Stakeholder. Hal ini menjadi pilar utama untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan.

Keberhasilan FMS Kota Bengkulu adalah antara lain Institusi Adat/Tokoh Adat telah mencetak Buku Adat di Sumber Cahyo di Kota Bengkulu yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, Tokoh Agama Kota Bengkulu telah menyusun draft buku panduan dalil-dalil Agama Islam tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

Selain perkambangan tersebut di atas, FMS di 3 wilayah (Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu) telah mengikuti Lokalatih HKSR Peka Gender Bagi Penyedia Layanan Kesehatan, yang dilaksanakan selama tiga hari tanggal 10-12 Agustus 2016 di Hotel Amaris Kota Bengkulu.

Lokalatih ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama, pendalaman perspektif, pengetahuan tentang gender dan isu HKSR serta penerapannya bagi Institusi Penyedia Layanan Kesehatan di Bengkulu.

Selain itu juga untuk berbagi pengalaman mengenai penyelesaian kasus-kasus HKSR perempuan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyedia layanan kesehatan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang peka gender, serta pengetahuan peserta mengenai kebijakan dan anggaran terkait pemenuhan HKSR.

Salah satu hasilnya adalah penyedia layanan dapat membedakan seks, gender dan seksualitas, dapat menghubungkan gender dengan HKSR, mengetahui tentang HKSR yang peka gender, mengetahui tentang kebijakan atau aturan terkait pemenuhan hak atau pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual (PP no. 61 tahun 2014, Permenkes No. 741 tentang SPM Bidang Kesehatan, PMK no. 97 tahun 2014 tentang kesehatan ibu hamil dan PMK no. 3 tahun 2016 tentang Aborsi).

Dari lokalatih juga menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk masing-masing tiga kabupaten/kota yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Rejang Lebong: Koordinasi dan advokasi ke pemerintah Kabupaten tentang PMK Np. 97 tahun 2014 dan PMK No. 3 tahun 2016 dan SPM, sosialisasi hasil lokalatih HKSR internal Dinkes sampai dengan tingkat PKM, menyusun rencana kerja anggaran 2017 untuk kegiatan HKSR, pemantapan kembali konselor sebaya pada program PKPR, penjaringan IMS pada remaja dan penjaringan kasus KtA dan KtP.
2. Kabupaten Seluma: Sosialisasi lintas program lintas sektor, peningkatan kapasitas Nakes dalam tata laksana ke gawat daruratan neonatal dan obstetri, sosialisasi LP/LS tentang KtA dan KtPA, sosialisasi dan pembentukkan konselor sebaya, mengajukan usulan Raperda tentang HKSR dan penanganan KtA dan KtP.
3. Kota Bengkulu: Mengadakan sosialisai PP 61 tahun 2014, PMK no 3 tahun 2016, PMK no. 97 tahun 2014, PMK no. 741 tahun 2014, sosialisasi pembentukan tim ANC Mobile, pelatihan tenaga medis dalam rangka pelaksanaan PMK no. 3 tahun 2016, sosialisasi Advokat HKSR dengan Stakeholder, pelaksanaan Riset IVA dan CBE, dan telaah studi pengembangan draf SPM Bidang Kesehatan.

⌘ FMS SUMATERA SELATAN

Selain FMS Kabupaten OKI, di Propinsi Sumatera Selatan sudah dibentuk lagi FMS Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim. Pembentukan FMS di Kecamatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelompok-kelompok dampingan WCC Palembang yang tersebar di 4 desa/kel di wilayah Gelumbang dan FKPAR di Kecamatan Gelumbang. Selain itu, forum ini juga akan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, berkoordinasi dan bersinergi serta kerjasama dalam pemenuhan HKSR perempuan. Diharapkan juga Forum ini dapat melakukan advokasi bersama untuk pemenuhan HKSR di masing-masing wilayah.

Pembentukan FMS Gelumbang dihadiri berbagai stakeholder yang terdiri dari perwakilan Puskesmas, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa, UPTD Pendidikan, BKKB, FKPAR dan berbagai pihak lainnya. FMS Gelumbang sepakat menamai forum ini dengan nama "FMS Belide Bangkit Bersama" yang punya makna bahwa semua masyarakat bisa bangkit bersama di berbagai bidang khususnya penyadaran tentang pentingnya Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Beberapa rencana kerja FMS yang mendesak harus segera dilakukan diantaranya adalah penguatan kapasitas FMS dengan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan gender dan HKSR, melakukan audiensi ke pihak terkait, melakukan pertemuan reguler.

Selanjutnya, merespons rencana kerja FMS Gelumbang, pada tanggal 19 dan 20 Desember 2016 dilakukan pelatihan gender dan pengenalan HKSR bagi anggota forum untuk menyamakan persfektif dan memberikan pemahaman mengenai Seks, Gender dan Seksualitas serta membahas lebih mendalam mengenai Kesehatan Seksual dan Kesehatan Reproduksi hubungannya dengan Ketidakadilan Gender.



Dok. WCC Palembang

Diakhir acara, para peserta sepakat membagi informasi dan pengetahuan yang didapat selama 2 hari itu ke dinas/lembaganya masing-masing dan akan mengupayakan mensinergikan beberapa kegiatan di lembaganya masing-masing.

⌘ FMS LAMPUNG

Menindaklanjuti komitmen dan pemahaman bersama FMS Bandar Lampung mengenai pentingnya untuk saling bersinergis menerjemahkan HKSR ke dalam sistem pencatatan kasus kesehatan seksual dan reproduksi, yang nantinya akan diperoleh data kasus KSR dari berbagai satuan kerja perangkat daerah secara cepat, akurat, dan periodik, yang akan dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya Percepatan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia.

DAMAR bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan kembali Diskusi Lanjutan untuk mematangkan sistem pencatatan kasus kesehatan seksual dan reproduksi yang sudah dirumuskan dengan melibatkan lembaga-lembaga penyedia layanan di Kota Bandar Lampung (Anggota FMS) .



Dok. DAMAR Lampung

Berdasarkan format yang telah dirumuskan bersama, masing-masing instansi berbagi cerita mengenai apa saja progres yang dialami di lembaga layanan terkait upaya yang telah dilakukan, kendala dan tantangan. Hasilnya:

1. Masing-masing instansi akan mengkritisi dan memberikan masukan terhadap draf instrumen pencatatan tersebut
2. Sebaiknya ada point tambahan mengenai
   - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
   - Penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan yang mengacu pada sumber-sumber yang biasa digunakan baik di kepolisian, menteri pemberdayaan perempuan
   - Frekwensi mengalami persoalan kesehatan seksual reproduksi. Misal, sekali atau lebih dari sekali yang mengalami kekerasan
3. Usulan Instrumen ini digunakan ketika korban datang ke puskesmas, baik sebelum atau sesudah visum
4. Terbangun kesepakatan-kesepakatan, yakni:
   - Instrumen pencatatan kasus kesehatan seksual dan reproduksi akan diuji coba di 30 puskesmas yang ada di Bandar Lampung
   - Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung akan mengeluarkan Surat Edaran terkait uji coba instrumen pencatatan yang akan dimulai pada Januari 2017
   - Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR ditunjuk sebagai lembaga yang akan mengkompilasi hasil pencatatan yang disampaikan oleh 30 puskesmas secara online, yang hasilnya akan disampaikan kembali ke 30 puskesmas tersebut.
   - Untuk memudahkan komunikasi di FMS maka dibuat WA Group
   - Untuk pelaporan kasus kesehatan seksual dan reproduksi direncanakan akan dilaporkan secara online
   - Satu minggu dari pertemuan ini akan berkunjung ke dinas kesehatan untuk menyampaikan hasil revisi hasil dari pertemuan ini supaya nanti bisa difinalkan dan sekaligus meminta izin kepada dinas kesehatan untuk memberikan surat edaran supaya form bisa dipakai oleh pukesmas-puskesmas
   - Penting dibentuk tim kerja dalam penanganan kasus kesehatan seksual dan reproduksi.

FMS Lampung Tengah & Lampung Selatan

FMS Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan telah menyepakati draf Tugas dan Fungsi FMS serta berencana untuk melakukan audiensi ke Bupati terkait SK Forum Multi Stakeholder.

Forum telah mematangkan hal apa saja yang harus segera dilakukan bersama dan akan menentukan waktu bertemu dengan Bupati dan DPRD untuk melakukan audiensi terkait SK FMS sehingga SK dapat segera diterbitkan.

FMS Kabupaten Lampung Tengah juga telah menyepakati akan saling bersinergi untuk mendorong kebijakan mengenai visum gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rencana tindak lanjut kedua forum ini, Peningkatan kapasitas pada masing-masing stakeholder (anggota FMS) terkait tugas dan peran serta Membuat media untuk mempermudah komunikasi antar stakeholder. ■

CERITA PERUBAHAN



Dari Buruh Tani Menjadi Perempuan Inspiratif Sumatera Barat

Oleh: Ritma Fitri, staff lapang LP2M, wilayah Tanah Lapang.

Reni yang biasa dipanggil Len (24 Tahun) seorang Perempuan Akar Rumput (PUK) dampingan LP2M yang dulunya adalah seorang buruh tani. Dari penghasilan sebagai buruh tani Len bersama dengan suami memenuhi kebutuhan hidup bersama empat orang anaknya. Bekerja membersihkan sawah, ladang dan kebun orang lain, dari satu tempat ke tempat lain tentulah tidak lepas dari beragam tantangan terutama jika tempat yang dituju jauh dari tempat tinggal. Keinginan dan semangatnya untuk berubah kehidupan agar lebih baik mendorong Len bertekad belajar tenun melalui dampingan dari LP2M. Semenjak itu, penghasilan Len pun juga bertambah dan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga Len yang dulu hanya makan satu kali sehari sekarang sudah bisa untuk makan tiga kali sehari.

Kemajuan yang mulai dirasakan tidak lantas membuat Len berhenti untuk terus bergerak maju. Kehidupan ekonomi yang mulai membaik mendorongnya untuk memotivasi masyarakat perempuan disekitar tempat tinggalnya untuk berkelompok dan belajar bertenun. Salah satu keyakinan yang rasakan Len setelah melewati proses-proses pahit dalam hidupnya dan juga menjadi sebuah kata-kata motivasi bagi dirinya adalah apapun bisa kita capai asalkan kita memilki kemauan untuk terus belajar dan berusaha. Kata-kata itu juga sering beliau sampaikan kepada anggota kelompoknya untuk terus semangat belajar.



Semenjak mulai bergabung dengan kelompok dan aktif dalam setiap diskusi peningkatan kapasitas perempuan akar rumput yang diadakan oleh LP2M, membuat Len semakin berani tampil didepan dan aktif untuk menggerakkan kaum perempuan di tempat tinggalnya untuk bertenun. Kondisi ini juga salah satu bentuk rasa pedulinya kepada masyarakatnya yang banyak mengganggur. Selain itu Len juga melakukan advokasi kepada Bappeda Tanah Datar agar ada alokasi dana untuk pemberdayaan tenun di daerahnya. Lobi dan negosiasi yang telah Len dilakukan membuahkan hasil. Satu bulan setelah advokasi yang dilakukan Len, Nagari Tanjung Bonai mendapatkan alokasi dana untuk pelatihan tenun dalam rangka menggerakkan penenun-penenun yang sudah mulai lahir di Nagari Tanjung Bonai. Len kemudian diminta oleh Pemerintahan Nagari untuk menjadi instruktur dalam pelatihan tersebut. Aktif mengikuti berbagai diskusi tentang HKSR, menjadikan perempuan periang ini turut serta mendampingi dan mencarikan solusi untuk penanggulangan kasus KDRT dan Kekerasan Seksual terhadap anak. Len juga turut serta mendorong Pemerintahan Nagari Tanjuang Bonai untuk tegas dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keaktifan Len dalam menggerakkan kaum perempuan di nagarinya menjadikan Len terpilih sebagai Perempuan Inspiratif Kabupaten Tanah Datar dan penghargaan sebagai Runner Up Perempuan Inspiratif Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam kategori Penggerak Ekonomi Masyarakat dan Penggiat Sosial di Masyarakat. Hingga saat ini Len tetap semangat menggerakkan kaum perempuan di tempat tinggalnya dan sudah mampu melahirkan penenun-penenun baru yang siap mengikuti jejak Len. ■

Aku, Pembatra, dan HKSR

Oleh: Sutiyem, Staf Lapang APM Jambi.

Nama saya Ibu Karmini. Saya sudah mengalami beberapa perubahan yang baik sebagai hasil dari program HKSR Permampu. Tetapi bagi saya perubahan yang paling mendasar adalah pengetahuan akan kewenangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Pembatra di saat melakukan pertolongan dalam proses kelahiran maupun perawatannya. Saya seorang dukun bayi dari desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin.

Saya berumur 56 tahun, memiliki 2 orang anak perempuan, dan nenek dari 3 cucu. Sejak Februari tahun 2015 saya mulai mengikuti kegiatan diskusi dan pelatihan HKSR bagi pemberi layanan pengobatan tradisional atau Pembatra yang difasilitasi oleh Aliansi Perempuan Merangin.



Saya sebagai Pembatra merupakan salah satu dari sekian banyak penerima manfaat mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya: Pendidikan kritis gender dan HKSR bagi Pembatra, pelatihan keterampilan layanan HKSR yang higienis kepada Pembatra, dan diskusi rutin forum pembatra dampingan APM. Pertemuan koordinasi antara Pembatra dan lembaga penyedia layanan kesehatan juga dilakukan agar lembaga penyedia layanan kesehatan dan Pembatra bekerjasama dalam pelayanan HKSR.

Sejak mengikuti kegiatan APM saya memperoleh pengetahuan dan sahabat baru sesama Pembatra dari desa dan kecamatan yang berbeda yang tidak saya kenal sebelumnya. Jenis pelayanan mereka juga beragam, diantaranya: menolong persalinan, perawatan paska persalinan, perawatan masa kehamilan, peracik jamu, tukang urut bayi dan bahkan ada yang memimpin atau melakukan upacara adat yang berkaitan dengan kehamilan dan bayi, misalnya tingkeban / tujuh bulanan, turun tanah, sapihan, dll.

Dalam diskusi dan pelatihan banyak istilah – istilah baru yang saya ketahui seperti istilah: empiris, komplementer, HKSR, Permampu, gender, reproduksi, penis, vagina dan STPT. Narasumber dari PKBI Jambi, Dinkes dan IBI Kabupaten Merangin mengakui bahwa kerjasama antara Pembatra dan bidan menjadi sangat penting karena jumlah Pembatra lebih tinggi daripada bidan dan kepercayaan masyarakat lebih tinggi ke Pembatra.

Narasumber dan Fasilitator mengajak berdiskusi dengan materi yang sangat bermanfaat sehingga Saya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Pembatra di saat melakukan pertolongan dalam proses kelahiran maupun perawatannya. Karena ketidaktahuan Saya, dulu Saya masih sering mengurut perut perempuan yang baru melahirkan, memandikan bayi baru lahir, perempuan sehabis melahirkan tidak boleh makan ikan atau daging karna Asi akan berbau anyir/ amis dan mengatakan agar tidak memberikan ASI pertama yang masih berwarna kekuningan kepada bayi. Ternyata itu semua sangat membahayakan dan merugikan bagi ibu maupun bayinya. Sekarang Saya sudah tahu dan tidak melakukan hal – hal yang merugikan ibu dan bayi tersebut. Ini perubahan terpenting yang terjadi pada diri Saya.

Setiap di panggil untuk menolong persalinan Saya selalu meminta kepada pasien untuk memanggil bidan desa dan Saya hanya mendampingi. Selain itu juga menganjurkan kepada ibu nifas untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi termasuk ikan, daging atau telur karna itu sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan dan dibutuhkan oleh ibu yang menyusui. Saya juga sering menjadi tempat konseling bagi ibu nifas mengenai perawatan kesehatan organ reproduksinya setelah melahirkan. Harapan Saya, bidan desa selalu ada di saat dibutuhkan dan lebih sabar dalam mendengarkan keluhan ibu hamil dan ibu Nifas. Sehingga tidak ada lagi AKI dan AKB yang disebabkan ketiadaan tenaga medis atau terlambat dalam penanganan, karena faktanya kadang kala bidan tidak berada di lokasi/desa setempat pada saat dibutuhkan. ■

Liputan Media PERMAMPU

⌘ Pernyataan Sikap FKPAR PERMAMPU

Kami FKPAR Sumatera dampingan Permampu, akan selalu kritis melihat setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, untuk memastikan kebijakan yang dibuat adalah berpihak kepada hak-hak perempuan. Perempuan otonom atas tubuhnya. Pengakuan atas integritas tubuh perempuan sebagai satu kesatuan tubuh, jiwa dan semangat adalah mendesak sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Selanjutnya di:
http://floweraceh.or.id/pernyataan-bersama-forum-komunitas-perempuan-akar-rumput-fkpar/

⌘ Flower Aceh gelar kampanye dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP)

Aksi kampanye tersebut untuk mendorong upaya-upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan di Pulau Sumatra, khususnya Di Aceh. Pelaksanaan kegiatan menjadi bagian dari aksi gerakan perempuan di Aceh.

Selanjutnya di:
https://www.kanalaceh.com/2016/11/29/sejumlah-lsm-gelar-kampanye-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/

⌘ Australian Deputy Ambassador mengunjungi Aceh

Wakil duta besar Australia berkunjung ke Aceh untuk bertemu dengan pemimpin politik, masyarakat, alumni, dan akademisi. Kegiatan ini diharapkan mengawali kerjasama penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pendampingan hukum.

Selanjutnya di:
http://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR16_065.html

⌘ Pemuda dan Pengungkapan Pelanggaran HAM Aceh

Pendiri Flower Aceh Suraiya Kammaruzzaman mengatakan, pemuda memiliki peranan penting dalam proses pengungkapan pelanggaran HAM di Aceh. Menurutnya, para pemuda bisa menjadi relawan dalam pengungkapkan pelanggaran HAM Aceh tempo dulu. Dengan begitu maka pemuda sebagai penerus bangsa akan bisa tahu sejarah bangsanya dahulu.

Selanjutnya di:
http://mediaaceh.co/news/pemuda-punya-peran-dalam-mengungkapkan-pelanggaran-ham-di-aceh-12502

⌘ Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat

Melalui kampanye internasional yang bertujuan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya di Aceh, Flower Aceh menyampaikan bahwa sekarang semakin meningkat kekerasan terhadap perempuan, namun semakin banyak juga yang sudah paham melaporkan kasusnya. Kalau korban tak berani melapor, maka orang sekitar harus peduli untuk ikut melapor kejadian ini. Jangan sampai korban menjadi korban lagi. Bila ada kekerasan harap segera melapo ke P2TP2A atau Flower Aceh.

Selanjutnya di:
https://www.harianaceh.co.id/2016/11/29/perempuan-aceh-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan/



⌘ Ratusan Aktivis Berpakaian Batik Besurek dan Baju Adat Datangi Pemkot

Ratusan anggota dan pengurus Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR) yang merupakan lembaga pendampingan dari Cahaya Perempuan WCC, Jumat (25/11) pagi melakukan aki simpatik. FKPAR yang terdiri dari kaum perempuan dan ibu ibu dari Rejang Lebong, Seluma dan Kota Bengkulu ini, dalam aksinya mengecam maraknya tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun kekerasan sesksual. Dalam aksi ini, massa sengaja megenakan pakaian adat dan Batik Besurek, yang melambangkan kekuatan perempuan yang bersatu walaupun berbeda suku dan budaya.

Selanjutnya di:
http://rbtv.co.id/ratusan-aktivis-berpakaian-batik-besurek-baju-adat-datangi-pemkot/

⌘ Belum Setahun, Ada 230 Kasus Kekerasan



Bertempat di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah (Sesda) Kota Bengkulu, Marjon, menerima kunjungan dari Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu. Kunjungan ini ditujukan untuk melihat pelaksanaan program yang dirancang oleh Pemerintah Kota untuk mencegah kematian terhadap perempuan dan anak di Kota Bengkulu.

Selanjutnya di:
http://pedomanbengkulu.com/2016/11/pemkot-komit-cegah-kematian-perempuan-dan-anak/

⌘ Aliansi Perempuan Merangin Berkomitmen Tegakkan Hak Perempuan

APM mengadakan dialog publik dengan tema "Membangun sinergi SKPD dan APM serta pemerintah Kab. Merangin dalam mendukung program HKSR".

Selanjutnya di:
http://komunita.id/2016/12/06/aliansi-perempuan-merangin-apm-berkomitmen-tegakkan-hak-hak-perempuan/

⌘ 2016, TErjadi 230 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bengkulu

Direktur Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu, Teti Sumari mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan belakangan cendrung meningkat, khususnya dialami oleh perempuan dalam rumah tangga karena faktor ekonomi.

Selanjutnya di:
http://www.beritasatu.com/nasional/401818-2016-terjadi-230-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bengkulu.html

⌘ 2,3 Persen Anak HArus Menikah

Stop perkawinan anak! Di Bengkulu secara nasional menempati rangking ke-6 peringkat perkawinan anak. Dimana sekitar 20,01 persen perempuan Bengkulu menikah di usia 17-18 tahun. Ketua WCC Tety Sumeri menyatakan salah satu penyebabnya kekerasan seksual terhdap anak, dimana 2,3 persen anak perempuan Bengkulu harus menikah.

Selanjutnya di:
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/12/13/23-persen-anak-harus-menikah/

⌘ 16 Hari AKTP Palembang

Tahun 2016 ini, kampanye 16 hari AKTP akan melakukan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Women's Crisis Centre Palembang dan Forum Organisasi dan Masyarakat Sipil Peduli Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Cita-cita kedepan, gerakan kampanye publik ini dapat menjadi sebuah gerakan sosial yang efektif untuk mendorong terciptanya masyarakat yang adil, demokratis dan menunjung nilai-nilai kemanusiaan. Melalui upaya bersama ini, Pemenuhan hak-Hak Perempuan akan terwujud.

Selanjutnya di:
http://www.assajidin.com/2016/11/24/dukung-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-acara-dipusatkan-di-kambang-iwak/

⌘ Berikan Pengetahuan HKSR kepada Publik

Untuk mengetahui bagaimana Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menurut agama dan perannya, Darma Wanita Persatuan Universitas Islam Negeri (DWP UIN) Raden Fatah Palembang dan Women's Crisis Center (WCC) Palembang mengadakan seminar publik dengan tema Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan dan Anak Bagi Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan di gedung program Pasca Sarjana UIN RAden Fatah.

Selanjutnya di:
http://sumselpostonline.com/berikan-pengetahuan-hksr-kepada-publik/

⌘ Wanita Harus Menjaga Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Women Crisis Center (WCC) Palembang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengadakan acara seminar publik bagi penyedia layanan dan organisasi kemasyarakatan tentang pentingnya Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) kota Palembang.

Selanjutnya di:
http://www.nuansakita.com/peristiwa/05122016/wanita-harus-menjaga-kesehatan-seksual-dan-reproduksi/

⌘ Sosialisasi KDRT dengan Kaum Muda

Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan "Women`s Crisis Centre" Palembang, Sumatera Selatan menggandeng sejumlah komunitas anak muda dan ibu-ibu untuk menggalakkan kegiatan sosialisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga, perempaun , dan anak-anak.

Selanjutnya di:
http://www.antarasumsel.com/berita/308451/wcc-palembang-gandeng-sejumlah-komunitas-sosialisasikan-kdrt

⌘ Diskusi Identifikasi Kasus Pelanggaran HKSR

LP2M mengadakan diskusi periodik FMS identifikasi kasus-kasus pelanggaran HKSR serta menyepakati upaya penanggulangannya di Kab. Padang Pariaman.

Selanjutnya di:
http://lp2m.or.id/diskusi-identifikasi-kasus-kasus-pelanggaran-hak-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-hksr/

⌘ Fitri Yunani, Pelopor Pengendalian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan, "Gerakkan Kaumnya Lewat Tenun"

Pada 28 Juni 2013, para perempuan penenun Kampung Pamasihan membentuk komunitas Perempuan Keramat Sakti. Awalnya, komunitas ini beranggotakan 12 orang saja, plus Fitri sebagai ketua. "Fitri dipilih karena paling menonjol, dan terbukti memang bisa memimpin. Sekarang pintar bicara dan kritis, dulu masih malu-malu," kata Ketua LP2M Ramadhani.

Fitri menularkan ilmu membikin songket kepada sejumlah remaja putri, yang membantunya menenun. Kehidupan warga di kampung Fitri memang susah. Banyak perempuan bekerja di ladang memungut getah karet.

"Untuk menambah pendapatan, mereka menenun kain pada malam hari," kata Fitri.

Selanjutnya di:
https://cantik.tempo.co/read/news/2016/12/27/335830645/kreasi-tenun-fitri-yunani-yang-mampu-mengerek-harga

⌘ Layanan RS di Lampung

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani mengatakan, kasus-kasus yang muncul akibat buruknya layanan kesehatan tersebut termasuk pelanggaran HAM. Menurut Sely, masalah HAM itu mengenai menurunnya kualitas pelayanan kesehatan dan dokter yang lalai. Sehingga mengakibatkan kematian ataupun luka berat.

Selanjutnya di:
http://lampost.co/berita/kalkm-kritisi-layanan-rumah-sakit-di-lampung

⌘ FGD Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Damar mengadakan FGD yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkualitas di lembaga penyedia layanan sebagai bentuk pemenuhan perlindungan dan layanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Selanjutnya di:
http://www.jejamo.com/damar-gelar-fgd-tentang-akses-keadilan-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan.html

⌘ Pelatihan Gender Untuk Media

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung akan melaksanakan pelatihan Gender dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Media. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Sely Fitriani menuturkan, untuk merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender serta anti kekerasan terhadap perempuan, maka Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR perlu menentukan strategi pendekatan kepada multipihak. Salah satu pihak yang dinilai mempunyai peran dan pengaruh dalam masyarakat adalah Media.

Selanjutnya di:
http://inilampung.com/lsm-damar-gelar-pelatihan-gender-dan-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



Sekretariat PERMAMPU
Jl.Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 | e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org | Facebook: PermampuConsortium